

**UPAYA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) SEBAGAI ORGANISASI
INTERNASIONAL DALAM MENENGAHI KONFLIK RUSIA DAN UKRAINA PADA
TAHUN 2022**

Risky Moehamad Adha

Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, UPNYK

Email : riskymoedha@gmail.com

Sayyidul Mubin

Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, UPNYK

Email : hail.sayyidul@gmail.com

ABSTRAK

Ketegangan Rusia-Ukraina yang terjadi di tahun ini sangat menyita perhatian dunia. Ketegangan ini pada awalnya terjadi dengan pengerahan ratusan ribu tentara Rusia di perbatasan Ukraina serta keterlibatan pihak NATO, termasuk Amerika Serikat yang mulai mengambil langkah, sehingga eskalasi konflik tak bisa terhindarkan. Tulisan ini menggunakan pendekatan liberalisme institusional dan datanya diambil menggunakan kajian pustaka penulis dari berbagai literatur terkait yang relevan dengan tulisan. Tindakan NATO yang ikut merespon tersebut menjadi ancaman bagi Rusia yang akhirnya semakin memperburuk konflik di perbatasan Ukraina. Sebagai sebuah organisasi internasional terbesar, PBB seharusnya memiliki peran yang besar dalam konflik ini sebagai pihak mediasi yang dapat mencari jalan keluar dari kedua belah pihak. Tulisan ini menganalisis peran PBB dalam mencari konklusi atas permasalahan tersebut, mengenai bagaimana peran, tujuan, dan fungsi - fungsinya dalam menemukan resolusi konflik. Menjadi sebuah kewajiban yang besar bagi PBB untuk menyelesaikan masalah ini, mengingat besarnya kemampuan yang dimiliki, serta banyaknya negara yang dapat berkontribusi agar nantinya konflik Rusia-Ukraina ini dapat dengan cepat diselesaikan.

Kata Kunci: Russia-Ukraina, NATO, PBB, Resolusi Konflik

ABSTRACT

The Russia-Ukraine tensions that have occurred this year have caught the world's attention. This tension initially occurred with the deployment of hundreds of thousands of Russian troops on the Ukrainian border and the involvement of NATO, including the United States, which began to take steps, so that the escalation of the conflict was inevitable. This paper uses an institutional liberalism approach and the data are taken using the author's literature review from various related literatures that are relevant to the writing. The actions of NATO which participated in responding to it became a threat to Russia which eventually worsened the conflict on the Ukrainian border. As the largest international organization, the United Nations has a big role in this conflict as a mediating party that can find a way out from both sides. This paper analyzes the role of the United Nations in seeking conclusions on these problems, regarding how its roles, objectives, and functions are to find a conflict resolution. As the international community, every country needs to take part in overcoming the ongoing conflict, and it is a great obligation for the United Nations to be the main tool in resolving this conflict, given the large capabilities it has, and the many countries that can contribute, so that later the Russia-Ukrainian conflict can be resolved quickly.

Keywords: Russia-Ukraine, NATO, UN, conflict resolution

PENDAHULUAN

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB (Inggris :*United Nations*) merupakan sebuah lembaga institusional yang memiliki cakupan global yang bertujuan untuk mendorong adanya kerjasama antara negara-negara di dunia. Kerjasama yang dibentuk ini merupakan sebuah momentum yang dibuat untuk menjadikan dunia bersatu sehingga bisa mengurangi kemungkinan-kemungkinan terjadinya konflik atau perang di masa depan. Hal ini menjadi sebuah hal yang dilematis karena di satu sisi PBB tidak bisa secara penuh memaksa suatu negara untuk tunduk, dan di satu sisi PBB juga memiliki misi untuk mencegah terjadinya konflik atau perang (Suryokusumo, 2012). Namun, PBB memiliki kebiasaan untuk memberikan sanksi kepada negara yang kurang patuh terhadap amanat dari piagam maupun resolusi yang telah ditetapkan. Jika negara

tersebut melanggar prinsip ini dan tidak patuh maka bisa dikenakan sanksi ekonomi dan apabila berlanjut bisa dikenakan sanksi militer.

Konflik Russia-Ukraina mulai terjadi pada akhir tahun 2021, tepatnya pada bulan November, dimana sekitar 100.000 pasukan tentara Rusia bersama dengan tank dan perangkat keras lainnya terlihat oleh citra satelit menumpuk di wilayah perbatasan (Oktarianisa, 2022). Intelijen Barat menilai bahwa kemungkinan besar Rusia akan menyerang Ukraina dalam waktu dekat. Penumpukan pasukan Rusia di perbatasan Ukraina tersebut disinyalir sebagai langkah Vladimir Putin untuk mendesak NATO menghentikan semua aktivitas militer di Eropa Timur dan Ukraina. Rusia melarang NATO menambah anggotanya dari Ukraina atau negara-negara bekas Soviet lainnya. Dalam 30 tahun terakhir, ekspansi NATO memang mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dan sekarang ekspansinya mulai mendekati ke arah perbatasan Rusia, sehingga Vladimir Putin langsung melakukan tindakan pencegahan untuk menghindari salah satu negara pecahan Uni Soviet, khususnya Ukraina, untuk bergabung dengan NATO.

Perang dan konflik bersenjata merupakan sebuah hal yang tidak bisa diterima oleh para pemegang prinsip liberalisme, yang mana hal ini merupakan bukan sifat asli dari manusia. Mereka percaya bahwa manusia mampu menjadikan kepercayaan dan mengembangkan dunia dengan kedamaian. Karena memang benar bahwa perang merupakan hal buatan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri melalui aksi-aksi militernya, baik secara internal maupun secara internasional. Kondisi yang ada antara Rusia dan Ukraina merupakan sebuah hal yang tidak terjadi secara alamiah, melainkan hal yang dibuat oleh manusia yang bukan berdasarkan sifat asli manusia. Hubungan yang renggang dan memanas diakibatkan oleh sebab-sebab yang diluar nalar dan diluar kelaziman perilaku manusia yang menginginkan terciptanya perdamaian.

Hubungan antara kedua negara Rusia dan Ukraina secara geopolitik memiliki dua sisi yang bersinggungan, dimana wilayah Ukraina bagian Barat pro terhadap Eropa dan wilayah bagian Timur pro terhadap Rusia. Ketegangan mulai memanas antara kedua negara ketika di tahun 2014 warga Ukraina secara kolektif menggulingkan kekuasaan dari Presiden Viktor Yanukovych yang cenderung Pro terhadap Rusia kala itu. Hal ini dikarenakan pada kala itu warga Ukraina menganggap bahwa dengan terlalu condong

dan pro terhadap Rusia maka ini menjadi manfaat tersendiri bagi Rusia untuk mendapatkan wilayah di Crimea (Adriyamarthanino, 2022). Mendengar kabar dikudetnya Presiden Viktor, pihak Rusia langsung memberikan kecaman dan pada Maret 2014 Rusia mengadakan manuver untuk menyerang Ukraina. Hal inilah yang menjadi pemicu awal terjadinya ketegangan antara kedua negara yang memiliki dua kepentingan dan juga tujuan yang berbeda. Dengan perbedaan tujuan tersebut salah satu pihak takut bahwa kepentingan pihak lainnya akan menjadi ancaman bagi negaranya.

Serangan pertama mulai diluncurkan oleh Rusia pada 24 Februari 2022, dan berhasil melumpuhkan lebih dari 70 fasilitas infrastruktur darat milik Ukraina (Pristiandaru, 2022). Serangan pertama Rusia tersebut bertujuan untuk demiliterisasi Ukraina dan membatasi ruang gerak Ukraina untuk melakukan hubungannya dengan NATO. Rusia masih terus melancarkan berbagai serangan, sehingga membuat perhatian dunia terfokus untuk segera menemukan resolusi konflik atas permasalahan tersebut. Konflik Rusia-Ukraina sejauh ini sudah memakan korban kurang lebih sebanyak 2,000 warga sipil Ukraina. Selain itu, tercatat sebanyak 835 ribu orang pengungsi telah meninggalkan Ukraina, mayoritas dari para pengungsi tersebut kabur ke Polandia (Mawardi, 2022). Menanggapi serangan dari Rusia, pemerintah Ukraina juga langsung memberikan beberapa serangan balasan dengan tujuan untuk memperoleh kembali beberapa wilayah, meliputi Kyiv, Makariv, Borodyanka, Kherson, dan Mykolaiv yang telah dikuasai oleh Rusia (Sef, 2022).

Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai Organisasi Internasional sebagai sebuah organisasi internasional yang terdiri dari negara-negara di dunia memberikan respon untuk menggelar pertemuan, yang kemudian disetujui oleh otoritas dari kedua belah pihak, baik Rusia dan Ukraina yang telah sepakat menggelar pertemuan mencari solusi mengakhiri perang. Organ-organ dari Perserikatan Bangsa-Bangsa juga saling membahu untuk mencari alternatif terbaik untuk meredam konflik yang mana menjadi tujuan utama ialah perdamaian antara kedua belah pihak untuk meminimalisir terjadinya korban dan juga ketidakstabilan ekonomi politik kedua negara maupun negara lainnya yang terdampak karena adanya perang.

Tulisan ini membahas bagaimana peran PBB dalam merumuskan resolusi konflik yang digunakan untuk menyelesaikan eskalasi konflik antara Rusia-Ukraina, menjelaskan fungsi dan tujuannya, serta pilihan opsi yang akan digunakan. Penulis juga akan membuktikan terkait hal-hal dan resolusi-resolusi yang sudah dikeluarkan oleh PBB selama tulisan ini ditulis apakah relevan dan juga apakah bisa meredam tensi ketegangan konflik antara kedua Negara Rusia dan Ukraina.

KERANGKA BERPIKIR

Penulis mengembangkan ide dan juga gagasan berdasarkan pemikiran-pemikiran dari Ilmu Hubungan Internasional yang mana dalam tulisan ini penulis menggunakan analisis berbasis Liberalisme. Liberalisme merupakan sebuah pendekatan di dalam Ilmu Hubungan Internasional yang menganalisis dan melihat adanya fenomena-fenomena di dunia berdasarkan asas positivistik atau segala hal yang terjadi di dunia merupakan hasil telaah yang pasti dan sejalan dengan pemikiran ilmu dari manusia. Peran PBB dan juga hasil dari aksi PBB dalam mengatasi ketegangan yang ada akan dilihat sebagai sebuah kasus fenomena global yang tidak benar, maka dari itu dibutuhkan kerjasama dan juga andil dari seluruh negara di dunia untuk bisa menengahi dan mencari jalan resolusi antar kedua negara.

Pemikiran mengenai liberalisme akan terlalu luas apabila tidak dikerucutkan lebih mendetail. Penulis akan menganalisis dengan sebuah teori turunan dari Liberalisme yaitu Liberalisme Institusional. Liberalisme institusional merupakan teori dalam ilmu hubungan internasional yang menjelaskan peran lembaga internasional (NGO atau IGO) terkait dengan hubungannya di dunia internasional. Berdasarkan pendapat Robert dan Georg Sorensen (2006) dalam bukunya yang berjudul *Introduction to International Relations: theories and approaches* menjelaskan bahwa entitas organisasi dan lembaga internasional seperti Uni Eropa, NATO, dan PBB memiliki peran dalam menjaga, membantu, dan meningkatkan hubungan antar negara dalam dunia internasional (Sorensen, 2006). Keberadaan dua entitas tersebut berperan besar dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia karena dapat mengurangi rasa ketidakpercayaan dan ketakutan antar negara. Lembaga dan organisasi internasional dalam sebuah konflik

memiliki peran yang cukup penting. Dalam sebuah konflik, lembaga internasional dapat berperan sebagai pihak ketiga yang dapat memberikan forum untuk bernegosiasi dan memberikan masukan terhadap keputusan negara untuk mencapai perdamaian.

Menurut pemikiran kaum liberalis, perdamaian ialah sebuah hal yang biasa atau hal yang memang lazim adanya (sebuah kenormalan). Hukum-hukum alam yang tercipta membuat manusia bisa hidup selaras dan bekerjasama. Maka dari itu, peperangan dan konflik khususnya konflik bersenjata ialah sebuah fenomena yang tidak alami atau tidak lazim adanya. Perang adalah buatan dan itu ialah sebuah alat buatan sehingga bukan dari hasil dari hubungan sosial atau keganjilan sifat manusia yang bersifat tidak sempurna. Pemikiran liberal sangat optimistis terhadap manusia yang akan membawa perdamaian dan juga keyakinan bahwa manusia akan membawa perkembangan yang baik terhadap kelangsungan hubungan sosial. Pemikiran ini tetap percaya bahwa manusia akan mampu untuk menghapuskan ketidaklaziman yang bernama perang dan menghapus noda perang di dalam ranah hubungan internasional.

Adapun tiga peran utama dari lembaga internasional menurut liberalisme institusional (Sorensen, 2006). Pertama, memberikan informasi dan rekomendasi kepada negara dalam bernegosiasi. Kedua, sebagai wadah yang digunakan oleh negara dalam mengawasi komitmen bersama negara lainnya. Ketiga, sebagai media penguat kepercayaan dan solidaritas bersama akan perjanjian internasional yang telah terbentuk.

Selain itu, dalam pandangan liberalisme institusional, keberadaan lembaga dan organisasi internasional memiliki tujuan dan fungsi tertentu. Tujuan dari keberadaan organisasi internasional adalah sebagai wadah untuk menjaga komitmen dan solidaritas atas peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama supaya tujuan dan kepentingan bersama dapat tercapai (Bennett, 1991). Sedangkan, fungsi lembaga dan organisasi internasional menurut Karns dan Mingst terbagi menjadi enam fungsi, yaitu: pertama, *Informational*, yaitu lembaga internasional berfungsi dalam sebagai wadah yang dapat memberikan data informasi; Kedua, *Forum*, lembaga internasional berfungsi sebagai wadah bertukar pikiran antar negara; Ketiga, *Normative*, berfungsi sebagai pedoman dasar dalam menetapkan perilaku negara dalam dunia internasional; Keempat, *Rule Creating*, berfungsi sebagai pengikat kewajiban dan tanggung jawab antar negara

melalui perjanjian atau kesepakatan; Kelima, *Rule Supervisory*, berfungsi sebagai entitas utama yang melakukan pengawasan terhadap kewajiban dan tanggung jawab negara; Keenam, *Operational*, berfungsi sebagai wadah yang dapat menyalurkan sumberdaya dan memberikan bantuan kepada negara lain (Mingst, 2004). Demikian bahwa, dasar teori yang menjelaskan tentang peran, fungsi, dan tujuan lembaga internasional berdasarkan pandangan liberalisme institusional.

Alasan kuat Liberalisme institusional menjadi kerangka dasar pemikiran penulis ialah karena tantangan globalisasi yang semakin luas dan kompleks menjadikan peran dari lembaga institusional yang memiliki peran besar (PBB) lebih memfokuskan pada tantangan-tantangan global yang terjadi. Kemudian institusi akan menjadi sebuah alat untuk mengkomunikasikan permasalahan kepada negara-negara lain dan mengeluarkannya dengan bentuk kesepakatan bersama yang terlegitimasi. Pemikiran ini membantu untuk menambah rasa percaya akan kerjasama negara-negara dan mengurangi rasa takut akan sebuah anarki yang terjadi di ranah panggung internasional (global).

METODE PENELITIAN

Metode penulis untuk merangkai dan melakukan analisis atas penelitian mengenai topik bahasan diatas penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian Kualitatif merupakan pendekatan Metode penelitian kualitatif merupakan metode riset atas suatu fenomena dengan menggunakan data-data yang bersifat tertulis, lisan, dan pengamatan atau observasi atas fenomena atau peristiwa terkait dengan objek yang diamati (Bakry, 2016). Pengumpulan data yang akan digunakan sebagai media analisis atas penelitian terkait menggunakan pendekatan studi kepustakaan pada penggalian informasi melalui buku, jurnal, dokumen resmi, majalah, laporan berita, dan mencari sumber-sumber lain dari internet. Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang langsung bersumber dari informan pertama seperti laporan langsung dari situs *online* PBB, Rusia, dan Ukraina. Sedangkan, data sekunder adalah data yang diperoleh dari analisis data atau informasi yang bersumber dari penelitian, artikel, dan/atau jurnal yang

sudah dilakukan oleh peneliti lain terkait dengan fungsi, tujuan, dan peran PBB dalam sebuah konflik. Data yang menjadi fokus pembahasan adalah terkait dengan data yang memberikan informasi seputar fungsi, tujuan, dan peran PBB dalam sebuah konflik khususnya konflik Rusia-Ukraina tahun 2022. Di sisi lain, tujuan dari digunakannya metode penelitian kualitatif deskriptif pada penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran PBB dalam konflik Rusia-Ukraina tahun 2022. Penelitian ini berusaha mencari informasi akan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh PBB dalam menghadapi konflik antar negara khususnya terkait dengan konflik Rusia-Ukraina.

PEMBAHASAN

Rusia pertama mengumumkan secara resmi untuk perang terhadap Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022, namun secara perang siber antara Rusia dan Ukraina sudah terjadi antara kedua belah negara semenjak aneksasi Rusia ke Crimea pada tahun 2014 silam. Hubungan yang selalu memanas dan terjadi secara terus menerus dari tahun ke tahun membuat kedua negara, yaitu Rusia dan Ukraina harus menempuh konflik yang cukup panjang (UNRIC, 2022). Konflik yang terjadi oleh kedua negara tentu berdampak kepada tatanan dunia internasional, yang mana dalam hal ini terkait perpolitikan global, keamanan, dan juga ekonomi.

Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai sebuah lembaga perdamaian mengemban tanggung jawab yang besar untuk bisa mendamaikan kedua belah pihak dan juga memulihkan keadaan ekonomi politik di wilayah regional tersebut (UN News, 2022). Maka dari itu, ketika awal deklarasi perang oleh Rusia pada Februari 2022 yang mana juga dibarengi dengan peluncuran militer secara ofensif ke wilayah kedaulatan Ukraina pada 23 sampai dengan 24 Februari 2022 Perserikatan Bangsa-Bangsa mengklasifikasikan serangan ini sebagai sebuah kekerasan di dalam integritas dan kedaulatan wilayah Ukraina, dan kontra dari prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Berbagai badan di dalam PBB menurut dari UNRIC (United Nations Regional Information Centre) yang mana pada 28 Februari 2022 pelaksana dari ICC (International Criminal Court) memulai langkah investigasi untuk kejahatan perang yang mencederai kemanusiaan di dalam konflik Rusia Ukraina (UN News, 2022). Selain itu, badan PBB

lainnya yaitu, UNHCR (*United Nations Human Rights Council*) juga mulai memberikan resolusinya menanggapi konflik dan peperangan yang menguat di wilayah Ukraina dengan secara *urgent* untuk membentuk sebuah *independent international commission of inquiry* yang mana hal ini disepakati pada tanggal 5 Maret 2022. Disusul dengan pada tanggal 16 Maret 2022 dimana ICC (*International Court of Justice*) meminta Rusia untuk segera menghentikan operasi militernya di Ukraina.

Akhirnya pada 7 April 2022, *United Nation General Assembly* atau Majelis Umum PBB mengesahkan resolusi untuk negara Rusia supaya menghentikan aksi militernya demi kemanusiaan, hal ini disampaikan oleh Human Rights Council. Dimana resolusi ini mendapatkan 2/3 Majority atau substantive voting dimana 93 negara *in favour* atau setuju dengan resolusi dan 24 negara tidak menyetujui resolusi tersebut.

Fungsi PBB dalam konflik Rusia dan Ukraina

PBB menjadi sebuah badan internasional yang menjadi harapan warga dunia untuk tercapainya dan terjaganya kondisi perdamaian di dunia. Sebagaimana yang tercantum di dalam pembukaan Piagam PBB: *"We the peoples of the united nations determined to save succeeding generations from the scourge of war..."* (PBB bertujuan untuk menyelamatkan generasi penerus dari ancaman terhadap perang) (Sianturi, 2022). Dilihat dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa PBB memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi diantara negara di dunia, dalam hal ini termasuk Rusia-Ukraina. PBB sebagai sebuah badan internasional yang terdiri dari berbagai negara dunia memegang peranan penting untuk keberhasilan resolusi konflik antara kedua negara. Marwah dari piagam PBB harus dijaga betul oleh seluruh bangsa yang secara jelas ikut dan tunduk terhadap segala peraturan demi perdamaian dan kelangsungan hidup umat manusia di dunia.

PBB juga memiliki fungsi lain, yang diantaranya meliputi fungsi proteksi, Integrasi, Sosialisasi, Pengendali Konflik, Kooperatif, Negosiasi, dan Arbitrase (Meisler. 2011). Dalam kasus Rusia-Ukraina, PBB harus menjalankan fungsi Pengendali Konflik, Arbitrase, dan Negosiasi, dimana Pengendali Konflik disini memiliki arti bahwa PBB menjadi aktor yang mendorong kerja sama antara pihak Ukraina dan Rusia untuk mengakhiri eskalasi

konflik yang telah terjadi. Dalam hal ini PBB haruslah mampu untuk menjadi sebuah pamong atau lembaga yang mengatur dan menjaga agar konflik yang terjadi tidak menjadi lebih parah. Maka dari itu, beberapa hal telah dilaksanakan oleh PBB melalui berbagai macam organ-organ dan organisasi terkaitnya. Hal ini terbukti bahwa PBB berusaha keras untuk mencegah dan mencoba menghentikan Rusia untuk mengirimkan pasukan militernya ke Ukraina. UNGA selaku badan dari PBB telah mengeluarkan resolusi untuk Rusia menghentikan operasi militernya demi alasan kemanusiaan. Hal ini dilakukan karena sudah banyak korban kemanusiaan yang berjatuh baik itu korban jiwa maupun korban non-jiwa (Meisler, 2011).

Data yang ada per 30 Mei 2022 korban yang berjatuh akibat perang ini mencapai 4.113 orang meninggal dunia. Dan tragisnya 264 korban merupakan anak-anak yang mana harus dilindungi (Setiaji, 2022). Maka dari itu, sebagai badan institusional pengendali konflik PBB berusaha untuk mewujudkan perdamaian dengan mengeluarkan resolusi-resolusi yang diyakini bisa efektif untuk meminimalisasi dampak dari perang itu sendiri. Hal ini juga tersampaikan dari berbagai macam pidato dan juga himbauan dari para petinggi PBB khususnya Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres yang mengatakan bahwa kita harus melaksanakan semuanya dengan kekuatan terbaik kita, sehingga kita menang bukan untuk Ukraina, tapi kita menang untuk seluruh Manusia (UN News, 2022).

Sementara itu, fungsi Negosiasi memiliki arti bahwa PBB menjadi pihak penengah ataupun fasilitator dalam pertemuan antar pihak yang berkonflik untuk membuat kesepakatan bersama secara adil dan progresif. Dalam hal ini, PBB memiliki fungsi untuk mempertemukan pihak Rusia dan Ukraina dalam satu ruangan untuk saling membahas jalan keluar atas permasalahan yang terjadi. Hal ini telah terjadi dimana UN General Assembly telah menyepakati untuk diadakannya panggilan kepada 5 negara permanen dari Dewan Keamanan (*United Nation Security Council*) dimana para anggota permanen diminta untuk *justify the use of the veto* (Farnaz, 2022).

Penggunaan hak veto yang seringkali dianggap disalahgunakan menjadikan alasan pembahasan mengenai reformasi mengenai aturan veto bisa membuat hal baru di dalam dewan keamanan. Pasalnya China dan Rusia dianggap oleh Amerika Serikat

sering menyalahgunakan hak vetonya apabila sedang ada kasus dan juga resolusi yang menyudutkan negara tersebut. Tentunya rencana ini sudah ada 40 tahun yang lalu, dan nampaknya masih bisa berjalan dengan lancar untuk memulai dibicarakan karena masih menuai pro kontra, khususnya bagi negara permanen di dewan keamanan PBB.

PBB dengan fungsi Arbitrase memiliki peranan yang besar sebagai naungan terakhir dalam penyelesaian konflik agar konflik yang terjadi sekarang tidak terulang di masa yang akan datang. Untuk mengakhiri konflik Rusia-Ukraina, PBB harus memaksimalkan kekuatannya dalam melakukan upaya penyelesaian konflik, seperti melakukan negosiasi, menyelenggarakan pertemuan antara kedua pihak dengan lebih intens, dikarenakan konflik ini sendiri telah menimbulkan dampak yang sangat besar dalam lingkup global, seperti meningkatnya harga minyak dan gandum yang telah memasuki tahap yang krusial. Tak hanya itu, besarnya penduduk Ukraina yang kabur ke Polandia nantinya juga menjadi permasalahan yang cukup serius, karena lonjakan penduduk di negara Polandia dapat terjadi, mengakibatkan meningkatnya tingkat pengangguran dan kemiskinan yang akan melaju dengan pesat. Melihat dari berbagai dampak skala global tersebut, PBB harus segera menjalankan fungsinya dalam upaya untuk mengakhiri konflik Rusia-Ukraina dengan semaksimal mungkin.

Tujuan PBB dalam konflik Rusia dan Ukraina

Dalam usaha untuk menyelesaikan konflik antara Rusia-Ukraina, PBB memiliki tujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 1 piagam PBB, yang diantaranya tujuan PBB meliputi memelihara keamanan dan perdamaian internasional; memajukan hubungan antar bangsa atas dasar persamaan hak dan penentuan nasib dari bangsa itu sendiri; menggunakan kerjasama internasional sebagai sarana dalam menyelesaikan persoalan internasional di berbagai bidang; serta sebagai pusat bagi penyelarasan segala tindakan negara dalam mencapai sebuah tujuan. Hal ini juga sinkron dengan apa yang telah dikatakan oleh Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan menilik kasus dan konflik yang terjadi di Ukraina, dia mengatakan bahwa *"As I have often said, the world must come together to silence the guns and uphold the values of the U.N. Charter,"*

Guterres menegaskan bahwa sebagai negara-negara anggota institusi yang mengedepankan asas perdamaian dan kemanusiaan, kita harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai dari Piagam PBB.

Secara garis besar, PBB bertujuan untuk membentuk kerjasama internasional yang setara dan menjaga kedamaian dunia. Piagam PBB menyebutkan prinsip – prinsip yang dipegang PBB dalam menjalankan tugasnya yaitu berdasarkan kedaulatan persamaan dalam anggotanya, setiap anggota punya tujuan yang mulia dalam melakukan tugasnya, tidak menggunakan kekerasan atau ancaman ke negara lainnya dan piagam PBB tidak digunakan untuk mengintervensi yurisdiksi domestik dalam negara anggota. Keanggotaan dari PBB adalah bersifat terbuka kepada negara yang menerima peraturan di Piagam dan bisa mengemban kewajiban tersebut. PBB memiliki tujuan yang besar untuk membangun perdamaian dunia dengan meminimalisir kemungkinan konflik yang ada. Dengan power dari PBB yang cukup besar, serta dengan banyaknya negara yang juga menyarankan untuk segera menyelesaikan konflik Rusia-Ukraina, seharusnya dapat membuat usaha PBB berjalan dengan lancar.

Sebagai tindak lanjut atas tujuan tersebut, pada 2 Maret 2022, PBB menyelenggarakan sidang umum yang bertujuan untuk menentukan bagaimana langkah yang sebaiknya diambil untuk menyelesaikan konflik Rusia-Ukraina. Dalam sidang umum tersebut, PBB dengan suara bulat mengecam tindakan invasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina, serta memerintahkan agar Rusia segera menarik setiap pasukannya yang telah dikerahkan ke wilayah perbatasan. Keputusan tersebut disetujui oleh 141 negara, dan hanya 5 negara saja yang menolak, sedangkan 35 negara lainnya memilih untuk abstain.

Bukti bahwa tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa serius terhadap permasalahan ini ialah pada Dewan Keamanan PBB pada 10 minggu awal dimana pertama kali Rusia melancarkan aksi militernya kepada Ukraina, badan ini telah banyak melaksanakan banyak upaya untuk membuat resolusi perihal penghentian perang. Dewan Keamanan PBB mencoba berdiskusi bersama anggota-anggotanya perihal ini untuk meminta Rusia menarik segala peralatan, dan juga pasukan militernya dari Negara Ukraina. Hal ini dengan alasan supaya memudahkan pemberian bantuan kemanusiaan kepada warga

sipil di Ukraina yang menjadi korban adanya perang antara kedua negara. Namun, dalam usaha-usahanya selalu ada kegagalan ketika hampir memutuskan resolusi karena Rusia selalu menggunakan hak vetonya sebagai anggota permanen Dewan Keamanan PBB.

Peran PBB dalam konflik Rusia-Ukraina

PBB merupakan organisasi internasional yang berperan utama dalam menjaga perdamaian dunia. Upaya utama PBB dalam menjaga perdamaian dunia dilakukan dengan langkah preventif untuk dapat menekan eskalasi ketegangan dan/atau konflik yang terjadi di berbagai negara di dunia. Dalam rangka menekan peningkatan eskalasi konflik kontemporer yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, PBB telah melakukan pendekatan diplomasi sejak tahun 2021 (PBB 2021). Dalam laporan yang disampaikan oleh PBB melalui situs resmi PBB pada 31 Januari 2021, menjelaskan bahwa PBB bersama dengan *Organization for Security and Co-operation in Europe* (OSCE) telah melakukan pendekatan diplomasi melalui pembahasan konflik Rusia-Ukraina (PBB, 2021). PBB mempertemukan pihak terkait dalam sebuah forum untuk membahas perbaikan hubungan antara Rusia dan Ukraina. PBB juga mendesak semua aktor untuk menahan diri dari berbagai tindakan provokatif dan retorika yang dapat meningkatkan ketegangan. Tindakan yang dilakukan PBB adalah salah satu bentuk tindakan preventif untuk dapat mengurangi ketegangan atas suatu konflik antar negara. Langkah preventif tersebut juga menunjukkan bahwa PBB melakukan pendekatan diplomasi secara hati-hati kepada pihak Rusia dan Ukraina agar konflik tidak terjadi.

Selanjutnya, setelah pada akhirnya konflik pecah dan menjadi perang. PBB juga hadir sebagai organisasi internasional yang berperan dalam menegakkan hukum internasional. PBB mengecam tindakan invasi yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina. Secara normatif, PBB menjalankan kerangka dasar aturan hukum internasional melalui pertemuan dewan keamanan PBB. Dalam pertemuan tersebut, dewan keamanan PBB membahas mengenai kemungkinan sanksi yang dapat PBB berikan terhadap pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Rusia serta resolusi konflik atas perang yang terjadi. Namun, pada pertemuan tanggal 25 Februari 2022, Rusia melakukan

negative vote atau veto atas keputusan tersebut yang kemudian menyebabkan hasil resolusi dewan keamanan tidak berlaku (PBB, 2022).

Pada 4 Maret Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diadopsi oleh Human Rights Council pada tanggal 4 Maret 2022, berisi mengenai hal-hal terkait dengan konflik Rusia Ukraina, rangkuman isinya ialah sebagai berikut :

Bahwa untuk meyakini kuat adanya kedaulatan dari politik dan wilayah kekuasaan dari sebuah negara dan juga kesatuan dari negara Ukraina, yang mana segala yang ada didalamnya bebas untuk menentukan nasib mereka sendiri. Kemudian untuk himbuan kepada seluruh negara untuk menghormati adanya hukum HAM internasional dan hukum HAM. Serta mengutuk keras adanya agresi kepada Ukraina oleh Negara Federasi Ukraina. Dan resolusi ini menjelaskan secara detail terkait korban, dampak, dan juga bagaimana bantuan yang akan datang kepada korban perang di Ukraina. Dan mengutuk keras supaya Rusia segera menghentikan adanya perang di wilayah Ukraina.

Meskipun demikian, PBB memiliki sanksi alternatif lain kepada Rusia yang telah melanggar hukum internasional dengan membawa kasus tersebut kepada pertemuan majelis umum PBB. Resolusi majelis umum PBB merupakan sebuah bentuk resolusi yang tidak dapat di veto oleh anggota dewan keamanan akan tetapi hasil resolusi tersebut tidak dapat memberikan kewenangan PBB dalam menurunkan pasukan perdamaian ke wilayah konflik. Namun, hasil resolusi majelis umum tetap dapat memberikan dampak tidak langsung kepada Rusia. Resolusi majelis umum PBB dapat digunakan sebagai acuan dasar negara lain untuk memberikan sanksi bilateral ataupun multilateral kepada Rusia. Resolusi majelis umum PBB juga berfungsi sebagai aturan normatif yang menjadi dasar langkah PBB dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada Ukraina. Di sisi lain, PBB juga terus memberikan informasi terbaru terkait dengan perang Rusia-Ukraina dan selalu hadir sebagai pihak ketiga yang dapat memberikan rekomendasi kepada perbaikan hubungan bilateral Rusia-Ukraina.

Penentuan langkah PBB dalam upaya menurunkan eskalasi konflik yang telah terjadi merupakan bentuk peran langsung PBB sebagai sebuah organisasi internasional. Hal itu merupakan tanggung jawab dan kewajiban PBB sebagai organisasi yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dunia. Demikian bahwa, peran PBB dalam

mengupayakan menurunnya eskalasi konflik yang terjadi merupakan langkah maksimal yang dapat PBB lakukan mengingat bahwa dalam melakukan pendekatan tersebut PBB harus berhati-hati perang tidak membesar dan meluas. Kekuatan Rusia sebagai negara besar dan merupakan salah satu anggota tetap dewan keamanan PBB membuat PBB tidak dapat melakukan pendekatan resolusi konflik yang lebih mengintervensi konflik tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis diatas maka dapat disimpulkan bahwa PBB telah menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai organisasi internasional. Kehadiran PBB dalam konflik Rusia-Ukraina yang merupakan implementasi dari fungsi, tujuan, dan peran sebagai organisasi internasional terlaksana secara normatif. Yang mana Perserikatan Bangsa-Bangsa terus menjalankan fungsinya meskipun banyak kegagalan dalam menghasilkan resolusi, dan juga belum terdapat titik temu diplomasi antara PBB selaku pihak institusi internasional dan Rusia selaku negara yang memiliki kepentingan dan juga konflik di wilayah Ukraina. Beberapa tindakan preventif juga dilakukan oleh PBB untuk meminimalisasi dampak dari agresi militer dari Rusia. Tindakan preventif merupakan upaya untuk menurunkan eskalasi konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina terus dilakukan dengan menggunakan pendekatan kehati-hatian agar eskalasi konflik tidak meluas dan menguat. Namun demikian, perang pada akhirnya tetap terjadi yang kemudian menuntut PBB untuk melakukan langkah represif terhadap pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Rusia.

Dalam merespon pelanggaran hukum internasional yang Rusia lakukan terhadap Ukraina, PBB hadir sebagai wadah yang membawahi komitmen bersama untuk dapat menghentikan perang Rusia-Ukraina. Penyediaan bantuan informasi, rekomendasi, serta bantuan kemanusiaan adalah bukti bahwa PBB memiliki peran dominan dalam upaya penyelesaian perang tersebut. Segala hal yang diupayakan PBB ialah untuk bagaimana caranya korban sipil bisa ditekan seminimal mungkin dan juga bantuan kemanusiaan kepada Ukraina bisa terus berjalan walaupun ada agresi militer. Dalam waktu

kedepannya, PBB tentu masih memiliki preferensi lain untuk dapat menghentikan perang yang mengancam kelangsungan hidup manusia dan stabilitas perdamaian dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakry, U. S. 2016. Metode Penelitian Hubungan Internasional. Pustaka Pelajar.
- Bennett, A. Leroy. 1991. International organizations : principles and issues. New Jersey : Prentice-Hall. Hal 2-4.
- Karns, Margaret & Mingst, Karen. 2004. International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance. Boulder : Lynne Rienner Publishers.
- Meisler, Stanley. 2011. United Nations : A History. New York City: GROVE/Atlantic, Incorporated, New York City. Hal. 28.
- Robert and Georg Sorensen 2006. Introduction to International Relations: theories and approaches. Oxford. Hal 108.
- (2022). "Sidang Umum PBB Kecam Keras Invasi Rusia ke Ukraina." <https://www.voaindonesia.com/a/sidang-umum-pbb-kecam-keras-invasi-rusia-ke-ukraina/6467959.html>. Diakses pada 27 Maret 2022.
- Hasudungan Sianturi, Marupa. "Peran PBB Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Yurisdiksi Negara Anggotanya Dalam Kasus State Immunity Antara Jerman Dengan Italia Terkait Kejahatan Perang Nazi." <https://media.neliti.com/media/publications/14991-ID-peran-pbb-sebagai-organisasi-internasional-dalam-menyelesaikan-sengketa-yurisdik.pdf>. Diakses pada 27 Maret 2022.
- Lambang Pristiandaru, Danur. 2022. "Rangkuman Hari Pertama Serangan Rusia ke Ukraina, 137 Orang Tewas, Chernobyl Direbut Pasukan Moskwa." <https://www.kompas.com/global/read/2022/02/25/101600270/rangkuman-hari-pertama-serangan-rusia-ke-ukraina-137-orang-tewas?page=all>. Diakses pada 27 Maret 2022.
- Mawardi, Isal. 2022. "Resolusi PBB untuk Setop Serangan Rusia ke Ukraina Disetujui." <https://news.detik.com/internasional/d-5966217/resolusi-pbb-untuk-setop-serangan-rusia-ke-ukraina-disetujui>. Diakses pada 27 Maret 2022.
- Oktarianisa, Sefti. 2022. "Kronologi dan Latar Belakang Konflik Rusia dan Ukraina." <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220304134216-4-320044/kronologi-dan-latar-belakang-konflik-rusia-dan-ukraina/3>. Diakses pada 27 Maret 2022.

Sef. 2022. "Serangan Balik! Ukraina Serbu Rusia di 5 Titik Sekaligus."

[https://www.cnbcindonesia.com/news/20220323143059-4-325323/serangan-balik-ukraina-serbu-rusia-di-5-titik-](https://www.cnbcindonesia.com/news/20220323143059-4-325323/serangan-balik-ukraina-serbu-rusia-di-5-titik-sekaligus#:~:text=Dalam%20update%20terbaru%20Selasa%20(22,%2C%20Boro)

[sekaligus#:~:text=Dalam%20update%20terbaru%20Selasa%20\(22,%2C%20Boro](https://www.cnbcindonesia.com/news/20220323143059-4-325323/serangan-balik-ukraina-serbu-rusia-di-5-titik-sekaligus#:~:text=Dalam%20update%20terbaru%20Selasa%20(22,%2C%20Boro)
[dyanka%2C%20Kherson%20dan%20Mykolaiv](https://www.cnbcindonesia.com/news/20220323143059-4-325323/serangan-balik-ukraina-serbu-rusia-di-5-titik-sekaligus#:~:text=Dalam%20update%20terbaru%20Selasa%20(22,%2C%20Boro). Diakses pada 27 Maret 2022.

University Of Southern California. 2016. "Organizing Your Social Sciences Research Paper". USC Libraries.

<https://libguides.usc.edu/writingguide/theoreticalframework> diakses pada 28 Maret 2022.